



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /POJK.03/2016

TENTANG

RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sesuai dengan visi dan misinya, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu menetapkan sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis;
  - b. bahwa rencana bisnis perlu disusun secara matang dan realistis dengan memperhatikan faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, serta bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu mempertimbangkan prinsip syariah;
  - c. bahwa rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi pengawas Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787);
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR atau BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi BPR atau BPRS mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Dewan Komisaris BPR atau BPRS mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
6. Direksi:
  - a. bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi BPR berbentuk badan hukum:
    - 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
    - 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

7. Dewan Komisaris:

a. bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi BPR berbentuk badan hukum:

1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 2

(1) BPR dan BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.

- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.
- (4) Rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Cakupan materi yang tercantum dalam rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah dalam periode 5 (lima) tahun tersebut sesuai kebutuhan BPR dan BPRS.

### Pasal 3

- (1) BPR dan BPRS harus menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan memperhatikan:
  - a. faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS;
  - b. prinsip kehati-hatian; dan
  - c. asas perbankan yang sehat.
- (2) Selain memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS harus menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan prinsip syariah.

### Pasal 4

- (1) Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
- (2) Direksi wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis kepada:
  - a. pemegang saham BPR atau BPRS; dan
  - b. seluruh jenjang organisasi pada BPR atau BPRS.

### Pasal 5

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

## BAB II CAKUPAN RENCANA BISNIS

### Pasal 6

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. strategi bisnis dan kebijakan;
- c. proyeksi laporan keuangan;
- d. target rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
- e. rencana penghimpunan dana;
- f. rencana penyaluran dana;
- g. rencana permodalan;
- h. rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- i. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
- j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
- k. informasi lainnya.

### Pasal 7

- (1) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS;
  - b. indikator keuangan utama; dan
  - c. target jangka pendek dan jangka menengah.
- (2) Rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategis jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun.
- (3) Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS dan proyeksi dari faktor permodalan, kualitas aset,

rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.

- (4) Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS:
  - a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
  - b. proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
  - c. proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran,  
dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
- (5) Indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit meliputi kinerja BPR atau BPRS:
  - a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
  - b. proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
  - c. proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
  - d. proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan,  
dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
- (6) Target jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah target kegiatan usaha BPR atau BPRS selama 1 (satu) tahun ke depan, paling sedikit meliputi penurunan *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF), peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi.

- (7) Target jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi BPR atau BPRS adalah target kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun ke depan, paling sedikit meliputi upaya penguatan permodalan, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR yang mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR atau BPRS.
- (8) Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, target penerapan tata kelola dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

#### Pasal 8

- (1) Strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. visi dan misi BPR atau BPRS;
  - b. arah kebijakan BPR atau BPRS;
  - c. kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPR atau BPRS;
  - d. analisis posisi BPR atau BPRS dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi;
  - e. strategi penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha; dan
  - f. strategi pengembangan bisnis.
- (2) Dalam hal belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai kebijakan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, kebijakan tata kelola dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Pasal 9

- (1) Proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit meliputi:
  - a. neraca; dan
  - b. laba rugi.
- (2) BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
  - b. proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
  - c. proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
- (3) BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
  - b. proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
  - c. proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
  - d. proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

Pasal 10

- (1) Target rasio-rasio dan pos-pos keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit meliputi:
  - a. target rasio keuangan pokok; dan
  - b. target rasio pos-pos tertentu lainnya.
- (2) BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target

pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

- a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
  - b. target akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS; dan
  - c. target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
- (3) BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
  - b. target akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
  - c. target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
  - d. target akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

#### Pasal 11

Rencana penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga; dan
- b. rencana pendanaan lainnya.

#### Pasal 12

Rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f paling sedikit meliputi:

- a. rencana penyaluran dana kepada pihak terkait;
- b. rencana penempatan pada bank lain;
- c. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan kepada bank lain;
- d. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan kepada debitur inti;

- e. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam penyaluran kredit atau pembiayaan;
- f. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan;
- g. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha; dan
- h. rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan akad bagi BPRS.

### Pasal 13

- (1) Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling sedikit meliputi:
  - a. rencana pemenuhan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan rasio modal inti;
  - b. rencana pemenuhan modal inti minimum; dan
  - c. rencana penambahan modal.
- (2) BPR atau BPRS yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS, wajib menyampaikan rencana pemenuhan modal inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
  - a. posisi aktual akhir bulan Oktober tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
  - b. rencana akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR atau BPRS;
  - c. rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
  - d. rencana akhir tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang disajikan secara tahunan.

#### Pasal 14

Rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h paling sedikit meliputi:

- a. rencana pengembangan organisasi;
- b. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar;
- c. rencana pengembangan SDM termasuk pemenuhan SDM; dan
- d. rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.

#### Pasal 15

(1) Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru untuk BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling sedikit meliputi:

- a. rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru untuk BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling sedikit meliputi:

- a. rencana penerbitan produk baru; dan
- b. rencana pelaksanaan aktivitas baru.

#### Pasal 16

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j paling sedikit meliputi:

- a. rencana pemindahan alamat kantor pusat;
- b. rencana pembukaan, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor cabang dan/atau kantor kas;
- c. rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan kas dan rencana penutupan kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, *payment point*, dan perangkat perbankan elektronik; dan

- d. rencana pemindahan *payment point* dan lokasi perangkat *Automated Teller Machine* dan/atau *Automated Deposit Machine*.

#### Pasal 17

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k paling sedikit meliputi informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR atau BPRS, namun belum disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf j.

### BAB III

#### PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS

#### Pasal 18

- (1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Desember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR dan BPRS.

#### Pasal 19

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR dan BPRS, apabila:
  - a. Rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau
  - b. proyeksi, target atau rencana yang disampaikan dalam Rencana Bisnis dinilai tidak realistis.
- (2) BPR dan BPRS wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30

(tiga puluh) hari setelah tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 20

- (1) BPR dan BPRS hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila:
  - a. terdapat faktor ekstern dan intern yang secara signifikan memengaruhi operasional BPR atau BPRS; dan/atau
  - b. terdapat faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja BPR atau BPRS, berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai perubahan Rencana Bisnis.
- (3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyampaian perubahan Rencana Bisnis.

#### Pasal 21

- (1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencapaian Rencana Bisnis yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi;

- b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis; dan
- c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

#### Pasal 22

- (1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai:
  - a. pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
  - b. faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BPR atau BPRS;
  - c. penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR atau BPRS; dan
  - d. upaya memperbaiki kinerja BPR atau BPRS.
- (4) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola BPRS dan manajemen risiko BPRS, laporan penilaian Dewan Komisaris mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS.

#### Pasal 23

- (1) Penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) disampaikan

oleh BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online*.

- (2) Kewajiban penyampaian Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  - a. BPR pelapor berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Rencana Bisnis dan Realisasi Rencana Bisnis secara *online*;
  - b. BPR pelapor baru beroperasi dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional;
  - c. BPR pelapor mengalami gangguan teknis; atau
  - d. terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada *database* atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPR pelapor memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan dan dokumen Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum menyediakan sistem secara *online*, penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *offline*.
- (5) Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris BPR dan BPRS secara *offline*.

#### Pasal 24

- (1) BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila BPR dan BPRS menyampaikan Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai

dengan 30 (tiga puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian Rencana Bisnis.

- (2) BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) apabila BPR dan BPRS menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan 20 (dua puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis.
- (3) BPR dan BPRS dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), BPR dan BPRS belum menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis.
- (4) BPR dan BPRS yang dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 25

- (1) BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila BPR dan BPRS menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
- (2) BPR dan BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila BPR dan BPRS menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir batas waktu penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

- (3) BPR dan BPRS dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu penyampaian BPR dan BPRS dinyatakan terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), BPR dan BPRS belum menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
- (4) BPR dan BPRS yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 26

Dalam hal batas akhir penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 27

- (1) Penyampaian surat dan laporan secara *offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 23 ayat (5) dengan alamat:
  - a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Khusus untuk BPRS, alamat penyampaian surat dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada BPRS.
- (3) Sebelum surat pemberitahuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPRS, BPRS menyampaikan surat dan laporan secara *offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 23 ayat (5) dengan alamat:
  - a. Departemen Perbankan Syariah, bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten/Kota Bekasi, serta Provinsi Banten; atau
  - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten/Kota Bekasi, serta Provinsi Banten.

#### BAB IV SANKSI

##### Pasal 28

- (1) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2), atau Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda:
  - a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
  - b. sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (2) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda:
  - a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
  - b. sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) BPR dan BPRS yang tidak menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) atau Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda:
  - a. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
  - b. sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) BPR dan BPRS yang menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), namun:
  - a. dinilai tidak lengkap; dan/atau
  - b. tidak dilampiri dokumen dan informasi sesuai dengan cakupan yang ditetapkan dalam Peraturan

- Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau ketentuan pelaksanaan terkait lainnya,
- dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) BPR dan BPRS dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah:
- a. BPR dan BPRS diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk setiap surat teguran; dan
  - b. BPR dan BPRS tidak memperbaiki penyesuaian Rencana Bisnis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran kedua.

#### Pasal 29

BPR dan BPRS yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 24 ayat (4), dan/atau Pasal 25 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; dan/atau
- c. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR dan BPRS.

#### Pasal 30

Sanksi atas :

- a. keterlambatan penyampaian Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2); dan

- b. tidak disampaikannya Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), berlaku efektif sejak bulan Desember 2017.

#### Pasal 31

Pengenaan sanksi secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 mulai berlaku untuk Rencana Bisnis tahun 2019.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2017 untuk Rencana Bisnis tahun 2018.
- (2) BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan Juni 2018.
- (3) BPR dan BPRS untuk pertama kali menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir bulan Juni 2018.

#### Pasal 33

Sanksi atas keterlambatan penyampaian atau tidak disampaikannya Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Pekreditan Rakyat untuk posisi akhir bulan Desember 2017 mengacu pada sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 35

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Maret 2018.

Pasal 36

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 258

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 37 /POJK.03/2016  
TENTANG  
RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sesuai dengan visi dan misinya, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan tata kelola yang baik. Sebagai salah satu langkah dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu menyusun dan menetapkan sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis.

Dalam rangka mencapai tujuan usaha sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu menyusun rencana bisnis dengan memerhatikan faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat, serta bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu mempertimbangkan prinsip syariah. Rencana bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Rencana bisnis merupakan salah satu acuan yang sangat penting bagi pengawas Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif. Selain itu, penyusunan rencana bisnis yang lebih awal juga akan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejak awal tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, agar rencana bisnis dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mencapai visi dan misi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan strategi pengawasan terhadap individual Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, perlu diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang rencana bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Bisnis yang realistis” adalah Rencana Bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat, termasuk prinsip syariah bagi BPRS, sehingga terukur dan dapat dicapai.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rencana jangka pendek” adalah rencana kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam periode 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan “rencana jangka menengah” adalah rencana kegiatan usaha BPR dan BPRS dalam periode 3 (tiga) tahun.

Yang dimaksud dengan “rencana strategis jangka panjang” adalah rencana kegiatan usaha bagi BPR dan BPRS dalam periode 5 (lima) tahun, dengan cakupan antara lain berupa arah kebijakan pengembangan dan penguatan permodalan, teknologi informasi dan sumber daya manusia.

Ayat (4)

Periode 5 (lima) tahun dihitung sejak penyampaian Rencana Bisnis BPR atau BPRS untuk pertama kalinya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “faktor ekstern” antara lain adalah kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “faktor intern” antara lain adalah kondisi keuangan, manajemen dan sumber daya manusia, serta kemampuan infrastruktur lainnya termasuk teknologi informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Rencana Bisnis dilaksanakan secara efektif apabila antara realisasi dan Rencana Bisnis terdapat:

- a. perbedaan yang tidak material; atau
- b. perbedaan yang material, namun BPR dan BPRS telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya disertai

dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima (*reasonable*).

Ayat (2)

Huruf a

Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Tahunan, atau bentuk komunikasi lainnya yang dibuktikan dengan dokumen tertulis.

Huruf b

Komunikasi Rencana Bisnis kepada seluruh jenjang organisasi pada BPR atau BPRS dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan oleh setiap pihak yang terlibat dalam operasionalisasi Rencana Bisnis sejalan dengan visi dan misi BPR atau BPRS.

Komunikasi dengan seluruh jenjang organisasi pada BPR atau BPRS dapat dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan pertemuan atau bentuk komunikasi lainnya yang dibuktikan dengan dokumen tertulis.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Visi dan Misi BPR atau BPRS disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan disampaikan oleh BPR dan BPRS setiap tahun.

Huruf b

Arah kebijakan BPR atau BPRS dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategis jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun meliputi informasi umum kebijakan BPR atau BPRS yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BPR atau BPRS di waktu yang akan datang.

Untuk BPRS, termasuk juga arah kebijakan dalam rangka penguatan penerapan prinsip-prinsip syariah.

Huruf c

Uraian mengenai kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPR atau BPRS meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko dan kebijakan dalam melaksanakan tata kelola, termasuk kebijakan remunerasi yang meliputi pemberian gaji, bonus dan fasilitas lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta bagi BPRS termasuk pemberian gaji, bonus dan fasilitas lain kepada Dewan Pengawas Syariah.

Huruf d

Dalam analisis posisi dijelaskan pula permasalahan dan hambatan BPR atau BPRS dalam menghadapi persaingan dengan BPR dan/atau BPRS lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jenis usaha” meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang mengacu pada kriteria usaha berdasarkan undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf f

Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha BPR atau BPRS yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekstern.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Target rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling sedikit dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.

Huruf b

Target rasio pos-pos tertentu lainnya paling sedikit meliputi target beberapa rasio terkait kredit atau pembiayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah terhadap total kredit atau pembiayaan, rasio dana pendidikan dan pelatihan terhadap total beban tenaga kerja tahun sebelumnya, rasio realisasi dana pendidikan dan pelatihan terhadap total dana pendidikan dan pelatihan yang dianggarkan, dan rasio agunan yang diambil alih terhadap total kredit atau pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana penghimpunan tabungan dan deposito baik dari pihak terkait maupun pihak tidak terkait, serta informasi mengenai penabung dan deposan inti.

Huruf b

Rencana pendanaan lainnya meliputi antara lain pinjaman dari bank lain dan/atau pinjaman yang tidak berasal dari bank.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana.

Huruf b

Bagi BPR, penempatan pada bank lain dalam bentuk:

1. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan/atau bank umum syariah; dan/atau
2. deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan/atau BPRS.

Bagi BPRS, penempatan pada bank lain dalam bentuk:

1. giro dan/atau tabungan pada bank umum konvensional;
2. giro, tabungan, deposito, dan/atau sertifikat deposito syariah pada bank umum syariah, dan unit usaha syariah; dan/atau
3. tabungan dan/atau deposito pada BPRS lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Debitur inti merupakan debitur individual atau debitur grup yang masuk dalam kategori 25 (dua puluh lima) debitur terbesar pada BPR atau BPRS di luar pihak terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam penyaluran kredit atau pembiayaan” BPR atau BPRS paling banyak pada 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase penyaluran kredit atau pembiayaan terbesar dari total portofolio penyaluran kredit atau pembiayaan BPR atau BPRS.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jenis usaha” meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang mengacu pada kriteria usaha berdasarkan undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Rencana pemenuhan rasio KPMM dan rasio modal inti mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS.

Huruf b

Pemenuhan modal inti minimum mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS.

Huruf c

Termasuk dalam rencana penambahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing shareholders*) dan rencana penambahan modal lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Bagi BPR, termasuk dalam rencana pengembangan organisasi antara lain rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengembangan teknologi informasi" adalah proses pengembangan sistem teknologi informasi baru termasuk penggantian atau perbaikan sistem teknologi informasi yang telah ada baik dilakukan secara mandiri oleh BPR atau BPRS maupun bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi.

Yang dimaksud dengan "pengadaan teknologi informasi" adalah proses pemenuhan atau penyediaan barang dan/atau jasa terkait teknologi informasi.

Termasuk dalam pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar antara lain perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti perbankan, pengadaan aplikasi inti perbankan baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, serta pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko BPR atau BPRS.

Huruf c

Termasuk dalam rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain pemenuhan sumber daya manusia, rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, termasuk rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia BPR atau BPRS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "alih daya" adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.

Rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap, yang meliputi jumlah maupun bidang kerja penugasan.

Pasal 15

Ayat (1)

Penyampaian pelaksanaan kegiatan usaha baru mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti.

Ayat (2)

Rencana penerbitan produk baru dan pelaksanaan aktivitas baru yang perlu dimuat dalam Rencana Bisnis mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 16

Pengertian kantor cabang, kantor kas, dan kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, *payment point*, dan perangkat perbankan elektronik mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau BPRS.

Pasal 17

Informasi lainnya meliputi antara lain langkah-langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, termasuk dengan cara pengambilalihan agunan dan/atau penghapusbukuan, penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih dan hapus buku, serta laporan BPR atau BPRS sebagai Penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Perubahan Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR dan BPRS disertai dengan alasan perubahan secara tertulis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “faktor ekstern” antara lain adalah kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “faktor intern” antara lain adalah kondisi keuangan, manajemen, dan perubahan kepemilikan.

Huruf b

Faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja BPR dan BPRS antara lain permasalahan solvabilitas, likuiditas, dan/atau permasalahan ekstern yang secara signifikan berdampak pada kinerja BPR atau BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembatasan frekuensi perubahan dan batas waktu pada ayat ini dimaksudkan agar BPR dan BPRS dapat membuat perencanaan yang realistis dalam menyusun Rencana Bisnis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Laporan disampaikan dalam bentuk perbandingan antara Rencana Bisnis dan realisasi Rencana Bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BPR atau BPRS antara lain faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Upaya memperbaiki kinerja BPR atau BPRS merupakan perbaikan terhadap faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian, penyesuaian, dan perubahan Rencana Bisnis, serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara *offline* disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Ayat (5)

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

## Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPR dan BPRS wajib untuk tetap menyampaikan Rencana Bisnis, mengingat bagi BPR dan BPRS Rencana Bisnis digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam rangka melakukan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi. Sementara bagi Otoritas Jasa Keuangan, Rencana Bisnis BPR dan BPRS digunakan sebagai referensi dalam perencanaan dan implementasi strategi pengawasan BPR dan BPRS.

#### Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPR dan BPRS wajib untuk tetap menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, mengingat bagi Otoritas Jasa Keuangan laporan tersebut merupakan salah satu sarana pengawasan BPR dan BPRS, khususnya untuk memantau efektivitas dan konsistensi pelaksanaan Rencana Bisnis BPR dan BPRS.

#### Pasal 26

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

#### Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

BPR dan BPRS yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak lengkap” adalah tidak sesuai dengan hal-hal yang perlu disesuaikan oleh BPR dan BPRS sebagaimana diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5955